



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 170/KPTS/BAPPEDA/2025

TENTANG

PENETAPAN PROYEK STRATEGIS DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Program Rencana Pembangunan Sumatera Selatan Tahun 2025, perlu ditetapkan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai bentuk sinergitas dan konektivitas yang saling berkesinambungan antara Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, menjadi Proyek Strategis Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Proyek Strategis di Sumatera Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 9);
17. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 5);
18. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**KESATU** : Proyek Strategis di Sumatera Selatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Proyek Strategis di Sumatera Selatan Tahun 2025 merupakan proyek dan/atau program, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Sumatera Selatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 11 MARET 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan Yth:

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
 NOMOR : 170/KPTS/BAPPEDA/2025  
 TANGGAL : 11 MARET 2025

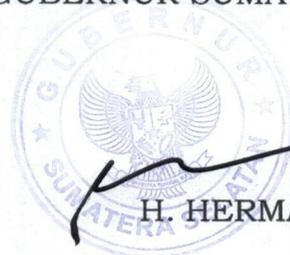
DAFTAR PROYEK STRATEGIS DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

NO	SKPA	DAFTAR PROYEK STRATEGIS DI SUMATERA SELATAN	LOKASI
1	2	3	4
1	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	Rehabilitasi Jalan Tanjung Raya – Bts. Prov. Bengkulu	Kabupaten Empat Lawang
2	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	Rekonstruksi Jalan Sp. Semambang - Sp. 9 Bangun Jaya (Musirawas)	Kabupaten MURA
3	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	Penggantian Jembatan Air Rasau Bentang (Ruas Jalan Sp. OPI - Babatan Saudagar - Srijabo)	Kabupaten Ogan Ilir
4	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	Penggantian Jembatan Temelat (Ruas Jalan Sp. Semambang - Sp. 9 Bangun Jaya (Musirawas)	Kabupaten Musi Rawas
5	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	Pembangunan Jalan dan Box Culvert Cempaka - Trans SP. 1	Kabupaten OKUT
6	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	Pemeliharaan Berkala Jalan Noerdin Pandji (Palembang)	Kota Palembang
7	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	Rekonstruksi Jalan KTM. Rambutan – Sp. Lorok (DBH SAWIT)	Kabupaten OI
8	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	Pembangunan Slab on Pile Ruas Jalan Lettu Karim Kadir (Gandus) - Bts. Kab. Banyuasin	Kota Palembang
9	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	Pembangunan Dinding Penahan Tanah di ruas jalan Pagaralam - Tanjung Raya STA 22 +120 (R)	Kabupaten Empat Lawang
10	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	Rehabilitasi Jalan Sp. Meranjat – Bts Kab. Muara Enim	Kabupaten Ogan Ilir
11	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	Rehabilitasi Jalan Tanjung Raja – Sp. Tambang Rambang	Kabupaten Ogan Ilir
12	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	Penggantian Jembatan Serami Kecil (Ruas Jalan Peninjauan (Sp. Batumarta Unit XII) - Sp. Lubuk Batang)	Kabupaten OKU
13	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	Penggantian Jembatan STA 03+100 di Ruas Jalan Trans Sp.1 - Sp. Tanah Abang	Kabupaten Ogan Ilir
14	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	Penggantian Jembatan Air Baung (Ruas Jalan Sp. Lima Pendopo Kab. Pali - Bts. Kab. Mura)	Kabupaten PALI
15	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	Penggantian Jembatan Air Siamang (Ruas Jalan Sp. 9 Bangun Jaya - Sp. Kulim (Bts. PALI)	Kabupaten Musi Rawas
16	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	Penggantian Jembatan Air Benakat (Ruas Jalan Sp. 9 Bangun Jaya - Sp. Kulim (Bts. PALI)	Kabupaten Musi Rawas
17	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	Pemeliharaan Berkala Jalan Plaju - Sp. Sungai Pinang - Bts. Kab Oki	Kabupaten Banyuasin
18	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	Pembangunan Dinding Penahan Tanah di ruas jalan Bts. Kab. Muara Enim - Sp. Air Dingin STA 11 +800 (R) Tahap II	Kabupaten Lahat

NO	SKPA	DAFTAR PROYEK STARTEGIS DI SUMATERA SELATAN	LOKASI
1	2	3	4
19	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	Pemeliharaan Berkala Jalan Bts. Kab. Muara Enim - Sp. Air Dingin	Kabupaten Lahat
20	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Rehabilitasi D.I Masam Balau	Kabupaten Lahat
21	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Rehabilitasi D.I Air Sunur	Kabupaten OKUS
22	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Rehabilitasi D.I Sungkai	Kabupaten OKUS
23	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Rehabilitasi D.I Selangis Besar	Kota Pagaram
24	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Rehabilitasi D.I Tebing Panjang	Kabupaten Lahat
25	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Rehabilitasi D.I Air Merendang	Kabupaten Lahat
26	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Rehabilitasi D.I Air Saten	Kabupaten Musi Rawas
27	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Rehabilitasi D.I Air Deras I	Kabupaten Musi Rawas
28	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Rehabilitasi D.I.R Jejawi	Kabupaten OKI
29	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Rehabilitasi D.I.R Sungai Pinang	Kabupaten Banyuasin
30	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Rehabilitasi Embung di Desa Kuripan	Kabupaten Muara Enim
31	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Perkuatan Tebing Sungai Desa Batang Hari Kec. Semidang Aji	Kabupaten OKU
32	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Perkuatan Tebing Sungai Belitang Desa Taraman Kecamatan Semendawai Suku III	Kabupaten Oku Timur
33	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Kabupaten Banyuasin
34	Dinas Kesehatan	Pembangunan Gudang Farmasi	Kota Palembang
35	Dinas Kesehatan	Rehabilitasi Gedung Ex-BKOKM	Kota Palembang
36	RSUD Siti Fatimah	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi pada Sub Kegiatan Pengembangan RS	Kota Palembang
37	RS Ernaldi Bahar	Belanja Rehabilitasi Ruang Merpati	Kota Palembang
38	RS Ernaldi Bahar	Belanja Renovasi dan Rehabilitasi Gedung Perawatan Adiksi Terpadu	Kota Palembang
39	Dinas Pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas	Kabupaten OKU Timur, Muara Enim, Musi Banyuasin dan Kota Palembang
40	Dinas Pendidikan	Rehabilitasi Ruang Guru/TU/Kepsek	Kota Palembang
41	Dinas Pendidikan	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Kabupaten Muara Enim, Musi Banyuasin dan OKI

NO	SKPA	DAFTAR PROYEK STRATEGIS DI SUMATERA SELATAN	LOKASI
1	2	3	4
42	Dinas Pendidikan	Pembangunan Gedung Kantor SMK Negeri	Kabupaten OKU Timur dan OKI
43	Dinas Pendidikan	Rehabilitasi Ruang Kelas	Kabupaten Musi Banyuasin, OKU Timur, dan PALI
44	Dinas Pendidikan	Rehabilitasi Gedung Asrama Siswa pada SMA Negeri Sumatera Selatan	Kota Palembang
45	Dinas Pendidikan	Pembangunan Ruang Perpustakaan	17 Kabupaten/ Kota
46	Dinas Pendidikan	Rehabilitasi Ruang Kepsek, R.Guru/TU	17 Kabupaten/ Kota
47	Dinas Pendidikan	Rehabilitasi Ruang Kelas	17 Kabupaten/ Kota
48	Dinas Perhubungan	Belanja Modal Bangunan Gedung Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api jalan keluar masuk Pelabuhan dan Pelataran Parkir	Kabupaten Banyuasin
49	Dinas Perhubungan	Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api	Kabupaten Banyuasin
50	Dinas Perhubungan	Belanja Pemeliharaan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal-Jalan masuk Terminal Inderalaya	Kabupaten Ogan Ilir
51	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sumsel	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Muara Enim dan Ogan Ilir
52	Dinas Sosial	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi warga miskin di Provinsi Sumatera Selatan	17 Kabupaten/ Kota
53	Dinas Perkebunan	Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian, Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan, dan pengedaran benih tanaman Sub Kegiatan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Kabupaten Empat Lawang
54	Dinas Perpustakaan	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di tempat-tempat yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi	Desa/Kelurahan di 17 Kabupaten/ Kota

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU